

Pengaruh Premi Asuransi Dan Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan Di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Sri Nurul Kur'aini^{1*}, Amran Razak², Anwar Daud³

¹Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

²Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

³Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

*Email: srinurulkuraini@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Premi asuransi;
persepsi; minat masyarakat;
keanggotaan BPJS;
dan kepesertaan BPJS Kesehatan

Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, jumlah kunjungan pasien umum di Puskesmas Lampa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan permasalahan serius yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Duampanua terkait cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi asuransi dan persepsi terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi sebanyak 51.593 jiwa. Sampel ditarik secara purposive sampling yaitu sebanyak 100 orang. Analisis data menggunakan metode analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis hubungan akan dilakukan menggunakan tabulasi silang dengan uji chi square. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel premi asuransi ($p=0,001$) dan persepsi ($0,000$) terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Diharapkan BPJS Kesehatan dapat mengembalikan sistem keanggotaan BPJS ke perseorangan seperti pada saat awal beroperasinya BPJS Kesehatan sehingga keanggotaan dapat diberikan pada satu orang saja dan tidak dibebankan pada seluruh anggota keluarga.

1. PENDAHULUAN

Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (1)

Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 19 ayat (1) tahun 2004, Jaminan Kesehatan Nasional pada dasarnya diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan, dilakukan dengan prinsip nirlaba, kepesertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan presentasi upah, yang mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk kesehatan dan dapat menggunakannya untuk

kebutuhan yang lain. Oleh karena itu masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dihimbau agar mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN agar tujuan *Universal Health Coverage* dapat tercapai (2).

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara khusus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (*Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional*) (3).

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya (4).

Jenis kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta Non PBI terbagi menjadi peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari Anggota Polri dan TNI, Pejabat Negara, PNS, Pegawai Swasta), Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja mandiri), dan Bukan Pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan). Sedangkan peserta PBI merupakan peserta jaminan kesehatan bagi orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan (5).

Kecamatan Duampanua merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pinrang yang masih rendah dalam hal cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kunjungan di salah satu Puskesmas di

Kecamatan Duampanua yaitu Puskesmas Lampa. Puskesmas Lampa merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kecamatan Duampanua yang terletak di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan status akreditasi Paripurna dimulai sejak tahun 2018. Adapun wilayah kerja Puskesmas Lampa terdiri dari 3 Kelurahan dan 4 Desa yaitu Kelurahan Lampa, Kelurahan Pekkabata, Kelurahan Tatae, Desa Paria, Desa Kaliang, Desa Kaballangan, dan Desa Katomporang (6).

Dalam pelaksanaannya, kunjungan pasien di Puskesmas Lampa dari Tahun 2018 hingga bulan Januari-Mei Tahun 2019 tertinggi adalah pasien umum dibandingkan dengan pasien BPJS Kesehatan. Banyaknya jumlah kunjungan pasien umum menunjukkan bahwa minat masyarakat di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang terkait kepesertaan BPJS Kesehatan masih kurang. Selain itu, jumlah peserta BPJS Kesehatan secara nasional hingga 1 Juni 2019 sebanyak 222.002.996 jiwa (82,53%) yang artinya belum seluruhnya masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jumlah cakupan kepesertaan hingga tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 9.400.000 jiwa yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga tahun 2019 di Kabupaten Pinrang yaitu sebanyak 217.432 jiwa. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang terkait jumlah cakupan kepesertaan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh premi asuransi dan persepsi terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang (7).

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Populasi sebanyak 51.593 jiwa. Sampel ditarik secara *purposive sampling* yaitu sebanyak 100 orang. Analisis data menggunakan metode analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis hubungan akan dilakukan menggunakan tabulasi silang dengan uji *chi square*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

3.1.1. Karakteristik Responden

Tabel 1 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan per bulan. Berdasarkan karakteristik umur, jumlah responden paling banyak berada pada kelompok umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 46 orang (46,0%), sedangkan jumlah responden paling sedikit berada pada kelompok umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 5 orang (5,0%). Berdasarkan jenis kelamin jumlah responden yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 orang (53,0%), sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 47 orang (47,0%). Berdasarkan pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 44 orang (44,0%), sedangkan responden yang paling sedikit adalah tidak tamat SD yaitu sebanyak 2 orang (2,0%). Berdasarkan pekerjaan jumlah responden yang paling banyak adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu sebanyak 22 orang (22,0%), sedangkan responden yang paling sedikit adalah Pelajar/Mahasiswa yaitu sebanyak 7 orang (7,0%). Berdasarkan pendapatan per bulan jumlah responden yang paling banyak adalah <Rp 1.500.000 yaitu sebanyak 70 orang (70,0%), sedangkan responden yang paling sedikit adalah Rp 1.500.000-Rp 2.500.000 yaitu sebanyak 8 orang (8,0%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 100 responden di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang jika dilihat dari premi asuransi bahwa terdapat 74 orang (74,0%) yang menyatakan bahwa premi asuransi tinggi dan 26 orang (26,0%) yang menyatakan bahwa premi asuransi rendah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 100 responden di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang jika dilihat dari persepsi bahwa terdapat 71 orang (71,0%) yang menyatakan bahwa persepsi baik dan 29 orang (29,0%) yang menyatakan bahwa persepsi kurang baik.

3.1.2. Analisis Bivariat

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang tergolong premi asuransi tinggi dan minat tinggi yaitu sebanyak 39 orang (52,7%) dan yang tergolong premi asuransi tinggi dan minat rendah yaitu sebanyak 35 orang (47,3%). Sedangkan responden yang tergolong premi asuransi rendah dan minat tinggi yaitu sebanyak 3 orang (11,5%) dan yang tergolong premi asuransi rendah dan minat rendah yaitu sebanyak 23 orang (88,5%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,001$, karena nilai $p < \alpha = 0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh antara variabel premi asuransi dengan minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 100 responden tergolong persepsi baik dan minat tinggi yaitu sebanyak 39 orang (54,9%) dan yang tergolong persepsi baik dan minat rendah yaitu sebanyak 32 orang (45,1%). Sedangkan responden yang tergolong persepsi kurang baik dan minat tinggi yaitu sebanyak 3 orang (10,3%) dan yang tergolong persepsi kurang baik dan minat rendah yaitu sebanyak 26 orang (89,7%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,000$, karena nilai $p < \alpha = 0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh antara variabel persepsi dengan minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

3.1.3. Analisis Multivariat

Analisis ini digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Pada analisis multivariat ini, uji statistik yang digunakan adalah uji statistik regresi logistik berganda. Metode yang digunakan adalah metode *backward stepwise (conditional)* karena variabel dependen merupakan variabel dikotomi dengan tujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Tabel 6 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji regresi logistik berganda, maka variabel yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan adalah variabel persepsi dengan

nilai Exp (B) paling tinggi yaitu sebesar 6,913 yang artinya masyarakat dengan persepsi yang baik cenderung 6,913 kali lipat lebih berminat dibandingkan masyarakat dengan persepsi yang kurang baik.

3.2. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel premi asuransi ($p=0,001$) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Semakin tinggi harga asuransi, maka seseorang akan semakin menahan diri untuk membeli asuransi (semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta) (8).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara biaya premi terhadap permintaan BPJS Kesehatan di Kota Bandar Lampung dimana hasil menunjukkan bahwa besaran biaya premi yang dibebankan kepada masyarakat dapat mengurangi keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan khususnya di Kota Bandar Lampung (9). Penelitian lain yang dilakukan oleh Pohan (2018) menyatakan bahwa hasil uji statistik menggunakan uji chi square diperoleh nilai $p = 0,002$, karena nilai $p < 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara iuran dengan keikutsertaan masyarakat dalam kepesertaan BPJS Mandiri (10).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestika et al (2017) yang menyatakan bahwa hasil uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan membayar premi dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri pada sektor informal. Nilai $p \text{ value} = 0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima sehingga ada hubungan antara kemampuan membayar premi dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri pada sektor informal. Hasil temuan di lapangan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sektor informal Poncol dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mempunyai kemauan untuk membayar premi kemungkinan besar mengikuti BPJS Kesehatan Mandiri, dan masyarakat yang tidak memiliki kemauan untuk membayar

premi cenderung tidak mengikuti BPJS Kesehatan mandiri (11).

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Royalty and Hagens (2005) yang menyatakan bahwa premi tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan karyawan mendaftarkan diri dalam asuransi kesehatan karena estimasi ini tidak signifikan secara statistik. Premi memiliki efek yang sangat kecil pada pengambilan keputusan mendaftarkan diri dalam asuransi kesehatan. Pada kenyataannya, karyawan yang sudah ditawarkan asuransi kesehatan sangat tidak sensitif terhadap premi dalam pengambilan keputusan (12).

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan kuesioner, masih ada beberapa indikator pada variabel premi asuransi yang menunjukkan ketidakinginan masyarakat terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan seperti pada item pertanyaan "Harga premi di BPJS Kesehatan sesuai dengan yang anda harapkan" dimana sebanyak 54% responden yang menyatakan "Tidak Setuju" karena sebagian besar dari responden hanya menginginkan yang gratis dan jika bisa mereka menginginkan premi iuran tiap bulan dikurangi dari premi yang sekarang. Selain itu, menurut mereka, harga premi terlalu besar karena dibebankan untuk per orang dalam 1 keluarga.

Selain itu, sebanyak 59% responden yang menjawab "Tidak Setuju" pada item pertanyaan "Kemudahan sistem pembayaran premi asuransi di BPJS Kesehatan" dimana sebagian besar masyarakat merasa malas dan enggan jika harus pergi ke Kantor Pos, Supermarket seperti Indo Maret/Alfamidi, ATM dan Bank karena jarak yang ditempuh cukup jauh dari rumah mereka menuju ke tempat tersebut, terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman desa yang harus menunggu air sungai surut terlebih dahulu agar bisa melewati jalan tersebut menuju kota.

Sedangkan pada item pertanyaan "Premi yang diterapkan bisa menjadi kendala karena jumlah anggota keluarga yang banyak" sebesar 52% menyatakan "Setuju" karena mereka merasa terbebani dengan jumlah anggota keluarga yang banyak untuk membayar BPJS per orang setiap bulannya, mereka mengatakan bahwa mereka sanggup

membayar jika biaya premi hanya dibebankan pada 1 orang saja dalam 1 keluarga, misalnya hanya pada kepala keluarga saja.

Selain itu, pada item pertanyaan “Jangka waktu pembayaran premi pada asuransi BPJS Kesehatan lebih panjang” sebesar 53% menyatakan “Tidak Setuju” karena mereka beranggapan bahwa jangka waktu pembayaran premi pada asuransi BPJS Kesehatan masih terbilang singkat yaitu hanya 1 bulan sementara mereka mengharapkan ada pertambahan jangka waktu pembayaran untuk meringankan mereka terlebih dahulu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemauan membayar untuk membayar premi BPJS Kesehatan berdasarkan konsep teori dipengaruhi oleh harga barang dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Harga barang yang tinggi akan membuat masyarakat tidak mau untuk mengeluarkan pendapatannya karena tidak pula diimbangi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya meskipun harga barang tinggi dan diimbangi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tinggi pula maka masyarakat akan memiliki kemauan untuk membayar (11).

Menurut De Allegri et al (2006), secara keseluruhan masyarakat menghargai tingkatan premi, namun masyarakat mengakui bahwa jumlah yang dibayar tetap tidak terjangkau bagi rumah tangga yang sangat miskin. Selain itu, masyarakat mengakui bahwa sistem pembayaran saat ini mensyaratkan bahwa premi dibayar sekaligus untuk seluruh rumah tangga, merupakan penghalang utama masyarakat dalam mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Selain itu, menurut Banthia et al (2009) menyatakan bahwa pembayaran rutin per bulan dalam asuransi kesehatan menyulitkan orang-orang dengan pendapatan musiman yang artinya tidak menentu jumlah penghasilannya. Setiap keputusan kebijakan tentang peningkatan jumlah premi dan periode pembayaran harus didasarkan pada kemampuan membayar orang-orang dengan penghasilan rendah (13).

Persepsi dalam penelitian ini adalah penilaian responden terhadap program BPJS Kesehatan. Menurut Robbin (2003) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensasi yang dirasakan

dengan tujuan untuk memberi makna terhadap lingkungannya (14).

Persepsi individu dapat menyebabkan adanya pengambilan keputusan dan perubahan perilaku dari hasil simultan antara faktor eksternal dan internal pada subyek atau orang yang melakukan perilaku tersebut termasuk untuk melakukan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan (15). Berdasarkan teori Kurt Lewin (1951) dalam Widhiastuti (2015) bahwa perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Bila persepsi seseorang terhadap manfaat suatu program tinggi, hal ini akan dikatakan sebagai pendorong ke arah tujuan yang diinginkan. Dorongan ini akan diperkuat apabila persepsi hambatan sebagai faktor penghambat ditemukan rendah, maka perubahan perilaku ke arah tujuan yang diinginkan akan lebih cepat (16).

Berdasarkan Tabel 21 menunjukkan bahwa dari 71 responden memiliki persepsi tergolong baik, terdapat 39 orang (54,9%) yang menyatakan minat tinggi dan 32 orang (45,1%) menyatakan minat rendah. Sedangkan sebanyak 29 responden memiliki persepsi tergolong kurang baik, terdapat 3 orang (10,3%) yang menyatakan minat tinggi dan 26 orang (89,7%) menyatakan minat rendah.

Setelah dilakukan analisis menggunakan uji *chi square*, diperoleh nilai $p = 0,000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara persepsi terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melinda et al (2016) yang menyatakan bahwa hasil uji statistik menggunakan uji *chi square* dengan taraf signifikansi 95% diperoleh nilai $p = 0,009$ ($p < 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara persepsi dengan minat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri. Hasil perhitungan risiko didapatkan $POR = 7,862$ (95% CI 1,631-37,905) yang berarti bahwa responden dengan persepsi baik terhadap BPJS Kesehatan memiliki kemungkinan untuk berminat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan sebesar 7,9 kali

lebih besar dari responden dengan persepsi kurang baik (17).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ernawati and Uswatul (2019) menyatakan bahwa responden yang memiliki persepsi negatif terhadap JKN (88,6%) dibandingkan dengan responden yang memiliki persepsi positif terhadap JKN (16,2%). Pada hasil uji statistik didapatkan p value $< 0,05$ (0,000) artinya terdapat hubungan yang bermakna antara kepesertaan JKN Mandiri dengan persepsi. Sedangkan berdasarkan perhitungan risk estimate didapatkan $PR = 40,042$ artinya responden yang memiliki persepsi negatif terhadap JKN mempunyai peluang 40 kali untuk tidak menjadi peserta JKN (18).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhoza (2016) yang menyatakan bahwa pada kelompok responden persepsi negatif lebih memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam kepesertaan BPJS dibandingkan dengan kelompok responden dengan persepsi positif. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa persepsi berhubungan dengan partisipasi pengambilan keputusan BPJS (JKN) dengan nilai p value $< 0,05$ ($p = 0,000$) (15). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johariyah (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara persepsi terhadap mutu layanan dengan keikutsertaan BPJS pada pasien Obstetri di RSUD Cilacap (19).

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan kuesioner, masih ada beberapa indikator pada variabel persepsi yang menunjukkan ketidakinginan masyarakat terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan seperti pada item pertanyaan "Saya menilai asuransi kesehatan pemerintah itu baik" dimana sebanyak 66% responden yang menyatakan "Tidak Setuju" karena sebagian besar dari responden menilai BPJS Kesehatan kurang baik karena masyarakat yang tergolong miskin, tidak diberikan hak sebagaimana ketentuan dari BPJS bahwa mereka bisa berobat secara gratis dan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), justru yang terjadi di lapangan adalah adanya kelemahan validasi data terkait kepesertaan JKN-KIS pada stakeholder baik di desa maupun kelurahan. Oleh karena itu, sebaiknya ada validasi data baru yang dilakukan oleh pemerintah

setempat untuk mengatasi masalah tersebut agar masyarakat yang tergolong miskin bisa memperoleh hak mereka untuk menjadi peserta JKN-KIS.

Selain itu, sebanyak 56% menjawab "Tidak Setuju" pada item pertanyaan "Sosialisasi melalui iklan, poster, dan pemberitahuan tenaga kesehatan mengenai BPJS Kesehatan terhadap masyarakat sudah baik" karena menurut masyarakat, sosialisasi melalui iklan, poster dan pemberitahuan tenaga kesehatan mengenai BPJS tidak pernah dilakukan baik itu dari pegawai BPJS sendiri maupun pegawai Puskesmas di Kecamatan Duampanua karena sosialisasi hanya dilakukan di kota saja. Sedangkan pada item pertanyaan "Ketentuan-ketentuan pada BPJS Kesehatan menurut saya sudah baik" sebanyak 49% menyatakan "Tidak Setuju" karena menurut mereka ketentuan dari BPJS Kesehatan khususnya mengenai obat masih kurang baik karena masyarakat yang berobat ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, kadang tidak mendapatkan obatnya di sana malah justru mereka diarahkan untuk membeli obat di luar dengan alasan bahwa obat sedang kosong. Selain itu, tidak semua obat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, hal itulah yang membuat masyarakat mau tidak mau harus mengeluarkan biaya tambahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel premi asuransi dan persepsi terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

REFERENSI

- [1] Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 2014.
- [2] Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004.

- [3] Kementerian Kesehatan. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013.
- [4] Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Republik Indonesia; 2014.
- [5] Pemerintah RI. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. 2018.
- [6] Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Puskesmas Lampa Tahun 2017. 2017.
- [7] BPJS Kesehatan. Data Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Pinrang Tahun 2018. 2019.
- [8] Feldstein PJ. Health Care Economics: Cengage Learning; 2012. 1-544.
- [9] Pratama A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan BPJS Kesehatan Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus : Pasien Pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. 2018.
- [10] Pohan LW. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Kotapinang. 2018.
- [11] Pangestika VF, Jati SP, Sriatmi A. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan Sektor Informal Dalam BPJS Kesehatan Mandiri Di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*. 2017;5(3):39-48.
- [12] Royalty AB, Hagens J. The Effect Of Premiums On The Decision To Participate In Health Insurance And Other Fringe Benefits Offered By The Employer: Evidence From A Real-World Experiment. *Journal Of Health Economics*. 2005;24(1):95-112.
- [13] Ndung'u TT. Factors Influencing Uptake Of National Health Insurance In The Informal Sector: A Case Of Ithanga Division In Murang'a County, Kenya. 2015.
- [14] Notoatmodjo S. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010. 1-248.
- [15] Rhoza N. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Keputusan Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. 2016;8(2):80-84.
- [16] Widhiastuti I. Hubungan Faktor Sociodemografi, Persepsi Dan Sosialisasi Dengan Kepesertaan Pasien Rawat Jalan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri Di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana; 2015.
- [17] Melinda M, Suparwati A, Suryoputro A. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan Bpjs Mandiri Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*. 2016;4(4):86-93.
- [18] Ernawati CT, Uswatul D. Hubungan Kepesertaan JKN Mandiri Dengan Pendapatan, Pengetahuan, Persepsi, Akses, Dan Kepercayaan Masyarakat Suku Sakai Di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*. 2019;8(1):25-9.
- [19] Johariyah. Analisis Keikutsertaan BPJS "Mandiri" Berdasarkan Status Ekonomi, Sikap, Dan Persepsi Atas Mutu Layanan. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*. 2016;7(2):20-33.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Kategori	Frekuensi	
		n	%
Umur	19-29	27	27,0
	30-40	22	22,0
	41-50	46	46,0
	51-60	5	5,0
Jenis Kelamin	Laki-Laki	53	53,0
	Perempuan	47	47,0
Pendidikan Terakhir	Tidak Tamat SD	2	2,0
	SD/Sederajat	12	12,0
	SMP/Sederajat	20	20,0
	SMA/Sederajat	44	44,0
	Perguruan Tinggi	22	22,0
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	7	
	PNS/TNI/POLRI	8	8,0
	Wiraswasta	14	14,0
	Buruh	17	17,0
	IRT	22	22,0
	Petani	18	18,0
	Karyawan Swasta	12	12,0
	Lainnya	2	2,0
Pendapatan Per Bulan	<Rp 1.500.000	70	70,0
	Rp 1.500.000-Rp 2.500.000	8	8,0
	>Rp 3.500.000	22	22,0
	<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 2. Analisis Univariat Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Premi Asuransi di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel	N	%
Premi Asuransi		
Tinggi	74	74,0
Rendah	26	26,0
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 3. Analisis Univariat Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Persepsi di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel	N	%
Persepsi		
Baik	71	71,0
Kurang Baik	29	29,0
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 4. Analisis Bivariat Pengaruh Premi Asuransi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel	Minat				Total N	Total %	Hasil Uji Statistik
	Tinggi		Rendah				
	n	%	n	%			
Premi Asuransi							
Tinggi	39	52,7	35	47,3	74	100,0	$p = 0,001$
Rendah	3	11,5	23	88,5	26	100,0	
Total	42	42,0	58	58,0	100	100,0	

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 5. Analisis Bivariat Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel	Minat				Total N	Total %	Hasil Uji Statistik
	Tinggi		Rendah				
	n	%	N	%			
Persepsi							
Baik	39	54,9	32	45,1	71	100,0	$p = 0,000$
Kurang Baik	3	10,3	26	89,7	29	100,0	
Total	42	42,0	58	58,0	100	100,0	

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 6. Analisis Regresi Logistik Pengaruh Premi Asuransi dan Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel	B	Wald	Sig	Exp (B)
Step 1 ^a Premi Asuransi	1,603	5,330	0,021	4,970
Persepsi	1,933	8,087	0,004	6,913
Constant	-3,947	14,363	0,019	32,447

Sumber: Data Primer (2019)